

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kota Batam berupaya mengembangkan sistem Bus Trans Batam sebagai transportasi umum yang terjangkau dan berkelanjutan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan (Dita & Wirawan, 2021). Upaya ini sejalan dengan komitmen global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada target SDGs 11.2 yang menekankan pentingnya penyediaan sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat (United Nations, 2015). Dalam konteks kebijakan nasional, penyelenggaraan transportasi publik di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyediaan sistem transportasi umum yang aman, nyaman, terjangkau, serta berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, komitmen Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengembangan transportasi publik yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen Pemerintah Kota Batam dalam pengembangan transportasi publik juga diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan. Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan sistem transportasi massal yang aman, nyaman, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung mobilitas masyarakat di Kota Batam. Kehadiran regulasi ini menunjukkan bahwa pengembangan Bus Trans Batam menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik.

Namun demikian, implementasi pengembangan transportasi publik di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan aksesibilitas, integrasi layanan, pembiayaan, serta partisipasi masyarakat dalam penggunaan transportasi umum (Pearce & Atkinson, 1998).

Dalam konteks pembangunan nasional, peningkatan sistem transportasi publik juga menjadi salah satu prioritas penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan transportasi massal yang aman, efisien, dan berkelanjutan menjadi salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi yang berpotensi menimbulkan kemacetan serta peningkatan emisi karbon di wilayah perkotaan (Banister, 2008). Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Kota Batam, proses pengembangan wilayah juga mengalami kemajuan yang signifikan. Hal tersebut ditandai dengan berkembangnya kawasan industri, permukiman, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang mendorong meningkatnya mobilitas masyarakat antarwilayah. Perkembangan kawasan-kawasan tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan perjalanan masyarakat, baik untuk kegiatan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, maupun aktivitas

sosial lainnya. Kondisi tersebut menuntut tersedianya infrastruktur transportasi yang mampu mendukung konektivitas antar pusat kegiatan secara efektif. Dalam konteks ini, transportasi publik menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung pengembangan wilayah karena berperan meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memperlancar mobilitas, serta menunjang aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap sistem transportasi publik yang terintegrasi di Kota Batam menjadi semakin mendesak sebagai upaya mewujudkan pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Namun, pengembangan sistem transportasi di Kota Batam masih menghadapi berbagai permasalahan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan pada sektor transportasi, seperti belum optimalnya akses layanan transportasi, konektivitas antarwilayah, serta sarana dan prasarana transportasi publik. Permasalahan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Permasalahan Transportasi Kota Batam

Gambar 1. 1 Permasalahan Transportasi Kota Batam

Belum optimalnya akses layanan transportasi	Belum optimalnya konektivitas moda transportasi penghubung/ terintegrasi antar wilayah	Perhubungan
	Belum optimalnya sarana prasarana transportasi publik	Perhubungan

Sumber: RPJMD Kota Batam 2025-2029

Salah satu upaya Pemerintah Kota Batam dalam mengatasi berbagai permasalahan transportasi tersebut adalah melalui pengembangan Bus Trans Batam sebagai layanan transportasi publik yang mendukung mobilitas masyarakat dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Pengembangan layanan ini diharapkan

mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, khususnya pada rute Punggur–Nongsa, seperti keterbatasan fasilitas halte, jumlah armada yang masih terbatas, serta waktu tunggu bus yang relatif lama.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Bus Trans Batam masih memerlukan berbagai upaya perbaikan agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, penguatan implementasi kebijakan menjadi langkah penting dalam mendukung peningkatan kualitas transportasi publik sekaligus mewujudkan pencapaian target SDGs 11.2 (United Nations, 2015).

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai kebijakan dan program pengembangan angkutan umum, termasuk pengoperasian Bus Trans Batam. Namun demikian, berdasarkan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2024, capaian indikator persentase tersedianya angkutan umum yang layak belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. 1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2024

Tahun	Persentase Angkutan Umum Layak (%)	Keterangan
2021	38	Awal peningkatan kualitas layanan angkutan umum
2022	41	Terjadi peningkatan kapasitas layanan publik
2023	44	Peningkatan signifikan, mendekati rencana strategis.

2024	44	Realisasi capaian stabil, belum mengalami peningkatan.
------	----	--

Sumber: LAKIP Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2024.

Data tersebut menunjukkan bahwa persentase ketersediaan indikator angkutan umum layak di Kota Batam mengalami peningkatan pada periode 2021-2023, namun stagnan pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, peningkatan kualitas transportasi publik belum juga optimal (Dinas Perhubungan Kota Batam, 2024).

Berdasarkan laporan tersebut, layanan Bus Trans Batam saat ini melayani beberapa koridor yang menghubungkan berbagai wilayah di Kota Batam. Bus Trans Batam merupakan salah satu moda transportasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Batam untuk mendukung mobilitas masyarakat serta mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Salah satu koridor yang beroperasi adalah rute Punggur–Nongsa yang melewati wilayah Punggur, Kabil, Sambau, hingga Teluk Mata Ikan. Koridor ini memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Nongsa dan sekitarnya. Koridor ini juga menghubungkan beberapa kawasan strategis di Kota Batam, seperti Pelabuhan Punggur sebagai simpul transportasi laut, kawasan industri Kabil, kawasan permukiman, serta akses menuju Bandara Hang Nadim. Kondisi tersebut menjadikan koridor Punggur–Nongsa sebagai salah satu jalur yang memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat.

Koridor Punggur–Nongsa dipilih sebagai fokus penelitian karena merupakan salah satu koridor pengembangan Bus Trans Batam yang masih berada pada tahap peningkatan layanan. Koridor ini menghubungkan kawasan yang terus berkembang, seperti kawasan industri, kawasan permukiman, pusat pertumbuhan

ekonomi, Pelabuhan Punggur, serta akses menuju Bandara Hang Nadim. Perkembangan wilayah tersebut menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi publik semakin meningkat. Selain memiliki peran strategis, koridor ini juga masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasi layanan, seperti keterbatasan fasilitas halte, jumlah armada yang belum memadai, serta waktu tunggu bus yang relatif lama. Kondisi tersebut menjadikan koridor Punggur–Nongsa relevan untuk dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih memerlukan upaya peningkatan implementasi kebijakan agar kualitas pelayanan transportasi publik dapat lebih optimal. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pengembangan Bus Trans Batam pada koridor Punggur–Nongsa menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendukung mobilitas masyarakat dan pencapaian target SDGs 11.2.

Namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pelayanan transportasi pada rute tersebut. Salah satu permasalahan yang sering ditemui adalah belum optimalnya fasilitas halte pada beberapa titik pemberhentian Bus Trans Batam. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sering kali harus menunggu bus di pinggir jalan tanpa fasilitas peneduh yang memadai sehingga ketika cuaca panas maupun hujan penumpang mengalami ketidaknyamanan dalam menggunakan layanan Bus Trans Batam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur pendukung seperti halte pada beberapa titik pemberhentian masih belum optimal.

Selain itu, aksesibilitas dan kualitas pelayanan Bus Trans Batam juga masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya jumlah armada yang

beroperasi pada koridor Punggur–Nongsa sehingga waktu tunggu bus relatif lama. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat harus menunggu dalam waktu yang cukup panjang dan dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pengembangan Bus Trans Batam pada koridor Punggur–Nongsa. Analisis tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan telah mampu meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik, khususnya dalam aspek penyediaan fasilitas pendukung, aksesibilitas layanan, dan kualitas pelayanan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan pengembangan Bus Trans Batam dalam mendukung pencapaian target SDGs 11.2.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pengembangan Bus Trans Batam dalam mendukung sistem transportasi publik yang berkelanjutan. Berbagai aspek seperti penyediaan infrastruktur pendukung, aksesibilitas layanan, kualitas pelayanan, serta efektivitas implementasi kebijakan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan penggunaan transportasi publik di Kota Batam. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Bus Trans Batam dilaksanakan sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi publik sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target SDGs 11.2.

Dalam konteks kebijakan publik, keberhasilan pengembangan transportasi umum tidak hanya ditentukan oleh perencanaan kebijakan, tetapi juga oleh proses implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh (Van Meter & Van Horn, 1975) Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kejelasan standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta sikap para pelaksana kebijakan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait pengembangan transportasi publik di Kota Batam maupun di daerah lain. Penelitian yang dilakukan oleh (Dita & Wirawan, 2021), menunjukkan bahwa kinerja operasional Bus Trans Batam, khususnya pada koridor I, masih menghadapi sejumlah kendala layanan. Penelitian lain oleh (Lodan et al., 2023) menyoroti kesiapan Pemerintah Kota Batam dalam mengimplementasikan transportasi berkelanjutan yang masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan manajemen layanan. Sementara itu, penelitian oleh (Sianturi & Dompok, 2023) menunjukkan bahwa inovasi berbasis e-government dalam pelayanan transportasi dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem transportasi publik di Kota Batam.

Kajian lain juga menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur transportasi yang mendukung keberlanjutan sistem transportasi perkotaan (Mashuri, 2024). Studi oleh (Mintana & Daulay, 2025) mengenai sistem Bus Rapid

Transit pada Trans Metro Bandung memberikan gambaran mengenai bagaimana pengembangan sistem transportasi massal dapat meningkatkan mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan. Selain itu, penelitian oleh (Simanjuntak et al., 2022) menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan angkutan umum di Batam dengan mempertimbangkan dampak sosial serta kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi dalam memahami pengembangan transportasi publik, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan pengembangan Bus Trans Batam dalam mendukung pencapaian target SDGs 11.2. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Bus Trans Batam pada koridor Punggur–Nongsa menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya berfokus pada implementasi kebijakan di salah satu koridor yang masih dalam tahap pengembangan layanan, tetapi juga mengaitkan hasil implementasi tersebut dengan pencapaian target SDGs 11.2 sebagai indikator transportasi publik yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian mengenai implementasi kebijakan transportasi publik serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan Bus Trans Batam. Dengan demikian, pengembangan sistem transportasi publik di Kota Batam diharapkan dapat mendukung terciptanya

mobilitas masyarakat yang lebih efektif, efisien, serta selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam target SDGs 11.2 (United Nations, 2015).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Bus Trans Batam pada koridor Punggur–Nongsa dalam mendukung pencapaian target SDGs 11.2?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengembangan Bus Trans Batam pada koridor Punggur–Nongsa?
3. Bagaimana upaya perbaikan implementasi kebijakan pengembangan Bus Trans Batam pada koridor Punggur–Nongsa dalam mendukung pencapaian target SDGs 11.2?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Bus Trans Batam pada koridor Punggur–Nongsa dalam mendukung pencapaian target SDGs 11.2.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengembangan Bus Trans Batam pada koridor Punggur–Nongsa.
3. Untuk merumuskan upaya perbaikan implementasi kebijakan pengembangan Bus Trans Batam pada koridor Punggur–Nongsa dalam mendukung pencapaian target SDGs 11.2.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik di sektor transportasi melalui implementasi pengembangan layanan Bus Trans Batam pada koridor Punggur–Nongsa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya literatur akademik terkait penerapan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh (Van Meter & Van Horn, 1975) dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendala pelaksanaan kebijakan transportasi publik dalam mendukung pencapaian target SDGs 11.2.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi pihak pemerintah Kota Batam dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan pengembangan Bus Trans Batam pada koridor Punggur–Nongsa agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan transportasi publik yang ekonomis dan berkelanjutan. Khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, perluasan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi umum, serta mendukung pencapaian target SDGs 11.2 dalam penyelenggaraan transportasi publik yang berorientasi pada keamanan, keterjangkauan, dan kemudahan akses.